

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Ketenagakerjaan merupakan permasalahan umum di suatu negara termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi peningkatan jumlah angkatan kerja dan pengangguran dengan tingkat yang terbilang tinggi. Hal ini terjadi diakibatkan tidak cukupnya lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja. Menurut Kuncoro (2003), jumlah tenaga kerja yang telah terisi lapangan pekerjaan yang tersedia ialah penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan jumlah angkatan kerja terjadi karena pertumbuhan penduduk di Indonesia juga meningkat setiap tahunnya. Data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2013-2018 kenaikan jumlah masyarakat Indonesia terjadi dari 252 juta jiwa jadi 267.7 juta jiwa. Hal ini diikuti dengan jumlah angkatan kerja sepanjang tahun 2013-2018 yang juga meningkat dari 118.2 juta jiwa menjadi 133.94 juta jiwa pada tahun 2018. Jumlah tersebut meningkat sebesar 13.3 persen dalam 6 tahun ini yang dapat mencerminkan bahwa Indonesia belum sukses dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Kenaikan jumlah angkatan kerja ini berdampak baik jika angkatan kerja yang ada bisa diserap secara maksimal oleh lapangan kerja yang tersedia, tapi jika angkatan kerja meningkat tetapi tidak diikuti oleh penyediaan lapangan pekerjaan akibatnya akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini yang sedang terjadi di

Indonesia, total pengangguran meningkat pada tahun 2018 sebanyak 130 ribu jiwa dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Pulau Sumatera adalah pulau kedua setelah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 54.8 juta jiwa. Tetapi apabila diperhatikan dari persenan pertumbuhan penduduknya, Pulau Sumatera adalah pulau dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, Pulau Sumatera dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8.7 persen dilihat dari tahun 2010 dan 2015. Sedangkan pulau besar lainnya seperti Pulau Jawa yang memiliki kenaikan penduduk sebesar 5.1 persen, Kalimantan dan Nusa Tenggara 8.6 persen, Pulau Sulawesi, Papua dan Maluku sebesar 8.2 persen. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik, 80 persen perekonomian Indonesia disumbangkan dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Pulau Sumatera memiliki kota-kota dengan perekonomian yang cukup diperhitungkan. Kota terbesar di Pulau Sumatra yakni Medan mempunyai ekonomi tertinggi di pulau ini contohnya kantor pusat beberapa perusahaan nasional ada di Kota Medan. Selain itu, ada kota-kota lain yang menjadi pusat berkembangnya ekonomi terbesar di Pulau Sumatera yaitu Kota Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan Kota Padang. Dalam permasalahan ketenagakerjaan, angkatan kerja di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 24.5 juta jiwa di tahun 2013 menjadi 27.9 juta di tahun 2018. Jika dipersentasekan, terjadi kenaikan sebesar 13.8 persen jumlah angkatan kerja selama 6 tahun dari tahun 2013-2018. Namun, Pulau Sumatera juga mengalami kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1.4 persen di tahun 2018 dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja terus bertambah, tapi disisi lain permintaan tenaga kerja yang masih terbatas dan keterbatasan lapangan kerja dan tidak dapat menyerap angkatan kerja lebih banyak, akibatnya adalah akan terjadi istilah yang dikenal pengangguran.

Menurut RUU tentang cipta lapangan kerja tahun 2020 (*Omnibus Law*) yang sedang di rencanakan oleh pemerintah Indonesia, perluasan kesempatan kerja akan meningkat apabila ada regulasi dari pemerintah. Di Indonesia, alokasi investasi belum berfokus pada sektor produktif, dan jumlah infrastruktur belum memadai. Jadi, regulasi akan membuat investasi dipermudah dan penyederhanaan perizin lokasi juga dipermudah. Apabila investasi meningkat, modal yang diperlukan untuk menghasilkan output akan semakin bertambah, jadi akan terdapat perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan selajian dengan meningkatnya perluasan kesempatan kerja.

Menurut Simanjuntak (1998), produktifitas yang tinggi pada pekerja merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan. Semakin tinggi pendapatan yang diterima diakibatkan produktifitas pekerja yang tinggi. Dengan begitu barang dan jasa pada perekonomian akan meningkat. Di Pulau Sumatera, perprovinsi pendapatannya dilihat dari pertumbuhan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan barang-barang atau jasa-jasa dalam waktu tertentu yang mempunyai nilai tambah disemua sektor ekonomi. Peningkatan total PDRB akan membuat tenaga yang terserap semakin banyak karena perusahaan memerlukan pekerja lebih banyak untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa.

Menurut Feriyanto (2014), penambahan permintaan tenaga kerja itu sendiri terjadi apabila perusahaan menghasilkan output yang lebih banyak sehingga penjualan yang meningkat terpenuhi oleh produksi yang juga meningkat. Pulau Sumatera mengalami pertumbuhan yang baik, terbukti dari data Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa PDRB di Pulau Sumatera mengalami kenaikan sepanjang tahun 2013-2018 yaitu sebesar 1.810.954 miliar rupiah menjadi 2.229.522 miliar rupiah. Penelitian oleh Ziyadaturrofiqoh (2018) mengenai penyerapan tenaga kerja dengan salah satu variabelnya yaitu PDRB menemukan bahwa PDRB dengan penyerapan tenaga kerja signifikan pengaruhnya di Provinsi Jambi. Ketika PDRB meningkat sebanyak 1 persen akan menaikkan penyerapan tenaga sebesar 0.69 persen. Selain mengupayakan PDRB, kebijakan mengenai upah minimum yakni upaya yang dilakukan dalam permasalahan penyerapan tenaga kerja yang ada yaitu menambah upah perkapita untuk pekerja, akibatnya upah yang dibayarkan diatas rata-rata.

Menurut Sumarsono (2003), banyaknya tenaga kerja yang diinginkan perusahaan berkrang dapat berpengaruh kepada harga produksi pada perusahaan yang tinggi, karena jika upah naik, hal tersebut akan menambah harga produksi perusahaan. Apabila harga produksi naik, konsumen akan menurunkan keinginan membeli barang bersangkutan, maka barang yang tidak terjual semakin banyak, maka perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang tersebut. Jika produk yang dihasilkan menjadi lebih minimum, akibatnya pekerja yang diinginkan perusahaan akan berkurang. Tetapi hal ini berlaku hanya untuk perusahaan yang banyak menggunakan pekerja berupa manusia daripada mesin.

Penelitian oleh Febryana Rizky (2016) menjelaskan mengenai penyerapan tenaga kerja dengan salah satu variabelnya yaitu upah Pulau Jawa pada tahun 2010 sampai dengan 2014 menemukan adanya pengaruh signifikan upah minimum provinsi dengan penyerapan tenaga kerja. Jika upah mengalami kenaikan 1 persen akibatnya penyerapan tenaga kerja akan berkurang menjadi 0.12 persen. Selain melakukan kebijakan upah minimum dan upaya meningkatkan PDRB, investasi dalam penyerapan tenaga kerja juga berperan penting karena investasi ialah suatu usaha membuat masyarakatnya lebih sejahtera, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat untuk jangka panjang (Mankiw, 2010). Sejahtera yang dimaksud antara lain pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

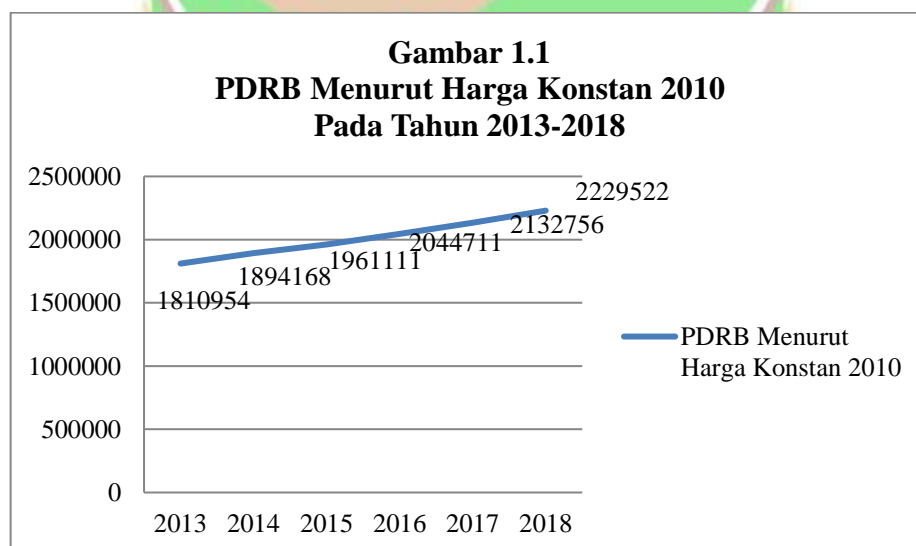
Penelitian oleh Nofandillah Arumsyah Putri dan Aris Soelistyo (2018) tentang penyerapan tenaga kerja di Gerbangkertasusila di tahun 2012 sampai dengan 2016 yang salah satu variabelnya adalah investasi menjelaskan adanya pengaruh positif dari investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan 1 persen investasi akibatnya terjadilah peningkatan kepada penyerapan tenaga sebesar 0,59 persen.

Di Pulau Sumatera, investasi mengalami kenaikan sepanjang tahun 2013-2018 dari 66.912,1 milyar rupiah menjadi 137.876,53 milyar rupiah. Hal ini menandakan bahwa investasi yang meningkat akan menyebabkan lapangan kerja bertambah dan pengangguran akan berkurang. Tetapi pada kenyataannya, di Pulau Sumatera pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi juga meningkat namun, tingkat pengangguran di Pulau Sumatera mengalami kenaikan sepanjang tahun

2013-2015. Sebenarnya masih banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara makro. Tetapi peneliti memilih untuk menggunakan ketiga variabel makro yaitu PDRB menurut harga konstan, upah minimum provinsi dan investasi karena sesuai dengan jurnal yang menjadi rujukan oleh peneliti.

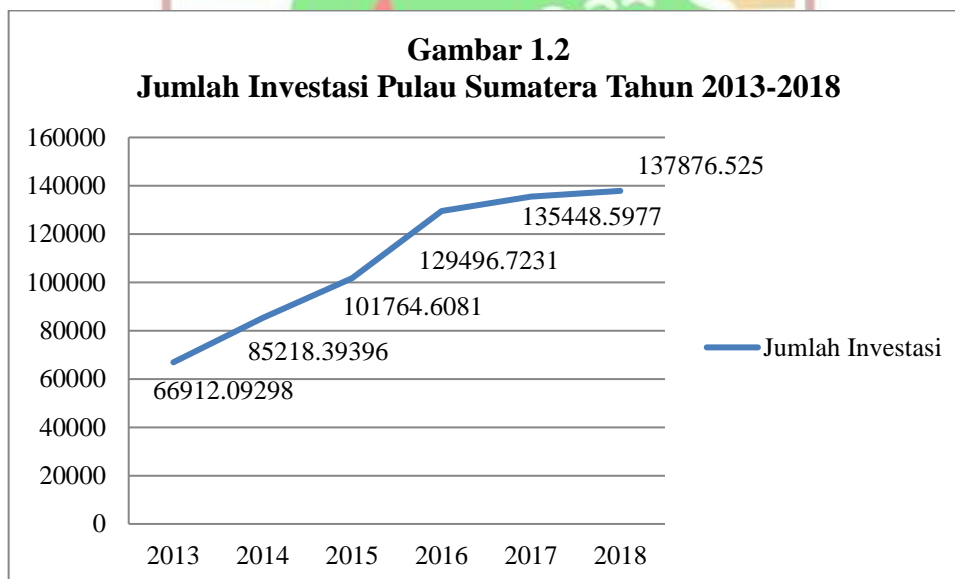
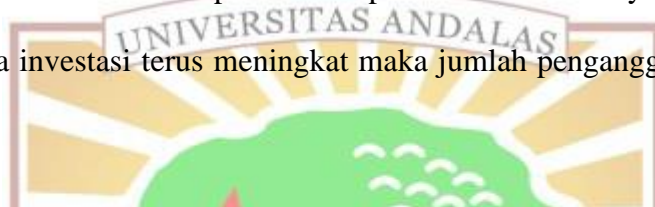
1.2 Perumusan Masalah

Konsep dikemukakan oleh Simanjuntak (1998) yang menjelaskan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB meningkat maka output atau penjualan meningkat dan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Tetapi di Pulau Sumatera pada tahun 2013-2018 pertumbuhan ekonomi yang diperhatikan dari pertumbuhan PDRB menurut harga konstan mengalami kenaikan dari 1.810.954 miliar rupiah menjadi 2.229.522 miliar rupiah. Seharusnya tenaga kerja yang diserap lebih banyak menyebabkan pengangguran akan berkurang.



Sumber : BPS

Faktor investasi dalam Mankiw (2010) yang mengemukakan dalam penyerapan tenaga kerja juga berperan penting karena investasi ialah suatu usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan naiknya pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga berbanding terbalik dengan fakta bahwa di Pulau Sumatera karena di tahun 2013-2018 investasi mengalami kenaikan dari 66912.09 miliar rupiah menjadi 137876.53 miliar rupiah. Kenaikan tersebut cukup signifikan dengan kenaikan rata-rata 4.5 persen setiap tahun. Sama halnya dengan PDRB, seharusnya jika investasi terus meningkat maka jumlah pengangguran akan dapat berkurang.

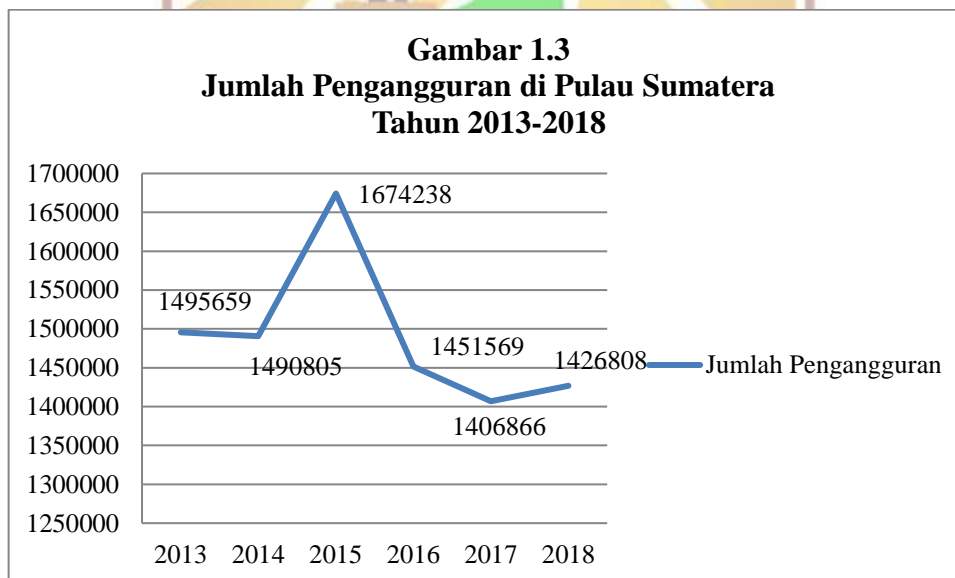
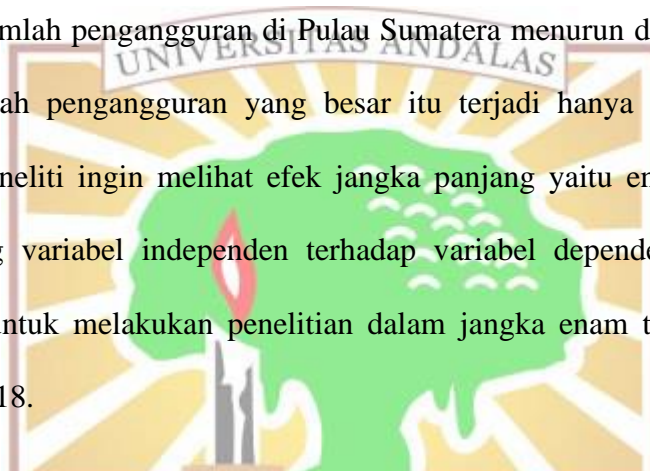


Sumber : BPS

Walaupun pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB dan investasi meningkat, faktanya jumlah pengangguran di Pulau Sumatera naik pada tahun 2015 sebesar 1.6 juta jiwa dengan persentase kenaikan 12.3 persen dibanding tahun tahun sebelumnya. Walaupun pada tahun 2016-2017 jumlah pengangguran

berkurang, pada tahun 2018 jumlah pengangguran kembali naik sebesar 1426808 jiwa dengan kenaikan 19.9 ribu jiwa dari tahun sebelumnya.

Fakta tersebut bertentangan dari yang dipaparkan Wallis (2002) dan Mankiw (2010) tentang pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki hubungan positifnya dengan penyerapan tenaga kerja. Apabila apabila tenaga kerja dapat diserap lebih banyak berarti pengangguran akan berkurang. Walaupun secara keseluruhan jumlah pengangguran di Pulau Sumatera menurun dan permasalahan kenaikan jumlah pengangguran yang besar itu terjadi hanya sepanjang tahun 2013-2015, peneliti ingin melihat efek jangka panjang yaitu enam tahun untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dalam jangka enam tahun yaitu pada tahun 2013-2018.



Sumber : BPS

Berdasarkan penjelasan dari persoalan diatas dapat dirumuskan masalah-masalah pokok yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera pada tahun 2013-2018?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera pada tahun 2013-2018?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau sumatera pada tahun 2013-2018?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan umum dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera pada tahun 2013-2018.
2. Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera pada tahun 2013-2018.
3. Menganalisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera pada tahun 2013-2018.

